

GAMBARAN KUALITAS DAN AKSES PELAYANAN DASAR DI DESA KRB III GUNUNG MERAPI KLATEN

Istianna Nurhidayati¹, Mawardi², Ambar Winarti³

¹Prodi S1 Keperawatan, STIKES Muhammadiyah Klaten

ABSTRAK

Kesiapsiagaan yang berbasis masyarakat sudah banyak dilakukan organisasi PBB, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun masyarakat yang melaksanakan program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Ada 7 (tujuh) *stakeholders* yang berkaitan erat dengan kesiapsiagaan masyarakat dan tiga diantaranya merupakan *stakeholders* utama, yaitu : individu dan rumah tangga, pemerintah dan komunitas sekolah. (LIPI– UNESCO/ISDR, 2006, h19).

Tujuan umum penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang arti dan makna pengalaman keluarga dalam mempersiapkan diri menghadapi bahaya gunung merapi di Desa Tegalmulyo. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif Populasi penelitian ini adalah seluruh keluarga yang ada di desa Tegalmulyo. Jumlah sampel penelitian sebanyak 7 partisipan yang diperoleh dengan tehnik *purposive sampling* yang sesuai kriteria inklusi penelitian. Pengumpulan data menggunakan tehnik *indepth interview*.

Hasil penelitian ini adapun jumlah pengangguran di KSN Merapi sejumlah 7.319 orang. Jumlah pengangguran terbesar didominasi oleh mereka yang tamat SMA yaitu 3.310 orang (45.2 persen), kelompok pengangguran yang tamat SLTP 1.461 orang (19.96 persen) seperti disajikan pada Tabel 3. Besarnya jumlah pengangguran di KSN Merapi tersebut diantaranya adalah akibat erupsi Merapi. Dampak Merapi telah menyebabkan kemunduran sektor pertanian (perkebunan dan peternakan) yang merupakan pekerjaan utama masyarakat sebelum terjadinya erupsi.

Kesimpulan dari penelitian ini Pelayanan dasar di daerah belum memenuhi kebutuhan bagi desa di daerah rawan bencana; 1) Pelayanan dasar di desa bencana merupakan salah satu bentuk mitigasi untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat desa di daerah rawan bencana. 2) Bencana alam gunung berapi mempunyai dampak kerusakan yang cukup besar terhadap wilayah di sekitarnya. 3) Akibat dampak primer erupsi Merapi yang berupa awan panas “*wedus gembel*” telah merusak fasilitas pelayanan dasar, perekonomian dan pelayanan dasar. 5) Kerusakan fasilitas pelayanan dasar telah menimbulkan dampak

Kata kunci: akses pelayanan dasar, KRB III Gunung Merapi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan mengalami bencana alam. Tahun 2005, *International Strategy for Disaster Reduction 2006-2009* dan *World Disaster Reduction Campaign dan United Nations Educational Scientific And Cultural Organizations* (ISDR/UNESCO) menetapkan Indonesia pada urutan ke-7 (tujuh) Negara di dunia yang rawan bencana alam. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2015-2019 menyebutkan ada 3 faktor utama penyebab bencana, antara lain yaitu bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia, kapasitas yang rendah pada berbagai komponen di tingkat masyarakat, serta kerentanan yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur dan elemen di dalam kota/kawasan yang beresiko bencana (Ningtyas, 2014, h1).

Wilayah Indonesia ditinjau secara geografis, geologis, geomorfologis, meteorologis, klimatologis merupakan daerah rawan bencana karena Indonesia termasuk negara tropis dengan curah hujan tinggi dan mengalami dua musim berbeda serta topografi yang kasar, maka berpotensi terjadinya banjir (*flood*), tanah longsor (*landslide*), dan kekeringan (*drought*) serta kebakaran hutan (*forest fire*). Wilayah Indonesia merupakan tempat bertemunya tiga lempeng tektonik aktif yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo Australia, dan lempeng Pasifik yang mengakibatkan wilayah Indonesia rawan terhadap bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Wilayah Indonesia juga terdapat beberapa gunung api yang masih aktif sampai sekarang diantaranya gunung sinabung, gunung kelud dan gunung merapi yang mengalami erupsi pada tahun 2014 (Sudibyakto, 2011).

Erupsi gunung api tercatat sebanyak 5 kejadian sepanjang tahun 2014 antara lain Erupsi Gunung Sinabung, Gunung Kelud, Gunung Sangeangapi, Gunung Slamet, dan Gunung Gamalama. Total 24 orang tewas, 128.167 jiwa mengungsi, dan 17.833 rumah rusak. Erupsi Gunung Sinabung menyebabkan 2.443 jiwa (795 KK) mengungsi di 7 titik dan sebanyak 1.212 jiwa (370 KK) harus direlokasi. Erupsi Gunung Kelud menyebabkan 7 tewas, sekitar 90 ribu orang mengungsi, dan 17 ribu lebih rumah rusak. Mengingat masyarakat sekitar Gunung Kelud sudah tangguh menghadapi bencana, dan memaknai erupsi sebagai warisan masa depan, maka pemulihan berjalan dengan cepat. Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 menyebabkan 277 orang meninggal di wilayah D.I. Yogyakarta dan provinsi Jawa Tengah. Dampak erupsi gunung Merapi bisa terjadi pada individu, keluarga, maupun masyarakat. Erupsi gunung Merapi tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi erupsi tersebut juga berdampak pada keluarga antara lain menyebabkan trauma pada keluarga, stress, terpisahnya dari anggota keluarga lainnya, kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian dan trauma yang berkepanjangan setelah terjadi bencana (Kaakinen, Duff, Coehlo, Hanson 2010, h494).

Upaya penanggulangan bencana telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. *Laporan Internasional Federation of Red Cross and Crescent Societies* atau IFRCRCS (2005)

disitasi Indiyanto (2012, h23) menyatakan pemerintah Indonesia telah memberikan alokasi perhatian pada kebencanaan sejak 1966 dengan pembentukan tim penanggulangan kondisi darurat yang kemudian dikukuhkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 1979 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diarahkan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Upaya-upaya Kesiapsiagaan juga diperlukan untuk mengantisipasi bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, individu juga perlu melakukan kesiapsiagaan bencana guna mengurangi kerugian akibat bencana.

Upaya kesiapsiagaan pada setiap individu atau kelompok tidak sama tergantung pada tingkat kesiapsiagaan bencana yang dipengaruhi oleh faktor sosial demografi, jejaring sosial, dan pengalaman banjir sebelumnya (Lindell and Perry, 2000 dalam Kirschenbaum, 2002). Tingkat pengetahuan tentang kesiapan bencana yang dimiliki tiap individu berbeda-beda sehingga akan menimbulkan respon yang beragam saat individu menghadapi keadaan darurat akibat bencana alam atau non-alam. Tingkat pengetahuan yang baik akan berkontribusi terhadap terciptanya rasa aman dan minimalisasi korban bencana. Upaya-upaya kesiapsiagaan diperlukan untuk meminimalkan korban bencana dalam bentuk kegiatan yang di mulai dari penyadaran masyarakat, keluarga, pemetaan kawasan rawan bencana, membuat dan menyiapkan jalur evakuasi, peringatan dini tentang gunung merapi, membentuk kelompok siaga bencana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, keluarga, individu untuk melakukan persiapan dalam menghadapi bencana melalui tindakan kesiapsiagaan, dengan tujuan untuk mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kemampuan menangani bencana.

Kesiapsiagaan yang berbasis masyarakat sudah banyak dilakukan organisasi PBB, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun masyarakat yang melaksanakan program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Ada 7 (tujuh) *stakeholders* yang berkaitan erat dengan kesiapsiagaan masyarakat dan tiga diantaranya merupakan *stakeholders* utama, yaitu : individu dan rumah tangga, pemerintah dan komunitas sekolah. (LIPI- UNESCO/ISDR, 2006, h19). Salah satu *stakeholders* utama yang memerlukan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana yaitu rumah tangga. Keluarga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengatasi bencana alam, karena peran keluarga dalam kesiapsiagaan sangat penting alasannya kepala keluarga berperan dalam menyampaikan informasi bagi anggota keluarganya, mengambil keputusan yang cepat dapat mempengaruhi anggota keluarga, kepala keluarga sebagai sumber dukungan sosial bagi keluarganya dan kepala keluarga dijadikan panutan oleh anggota keluarganya (Effendi, 2009 disitasi Kumoro, 2013, h2). Kemampuan yang harus dimiliki kepala

keluarga sebagai wujud dari kesiapsiagaan adalah mempunyai pengetahuan dan sikap terhadap bencana seperti ketrampilan pertolongan pertama, menggerakkan anggota keluarga untuk mengikuti latihan dan keterampilan evakuasi, menyiapkan kebutuhan makanan yang dapat disimpan dan tahan lama, menyiapkan kotak P3K dirumah (LIPI- UNESCO/ISDR, 2006, h20-21).

Penelitian sebelumnya (Rante, 2012, h7) menjelaskan kurang siapnya rumah tangga menghadapi bencana longsor karena mereka belum memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan tersebut meliputi rendahnya kemampuan mengenali bencana yang berpotensi terjadi di lingkungan tempat tinggal, kemampuan mengenali tanda-tanda akan terjadinya bencana, dan kesadaran untuk mengelola lingkungan tempat tinggal yang ramah bencana. Kesiapsiagaan masyarakat khususnya keluarga memiliki kesiapan menghadapi bencana sangat penting hal tersebut untuk mengurangi korban jiwa. Kesiapsiagaan perlu terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana khususnya keluarga yang tinggal di dekat wilayah rawan bencana khususnya di Desa Tegalmulyo. Penelitian ini akan dilakukan didaerah yang terkena dampak bahaya gunung merapi yaitu di Desa Tegalmulyo Kecamatan Kemalang dengan jumlah 748 KK (Kepala Keluarga) yang terkena dampak bahaya gunung merapi (Laporan Kependudukan Desa Tegalmulyo 2015). Desa Tegalmulyo salah satu desa yang terkena dampak bahaya gunung merapi selain Desa Balerante dan Desa Sidorejo dan belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang kesiapsiagaan keluarga di Desa Tegalmulyo.

BAHAN DAN METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kebijakan merupakan proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalahmasalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan dan tingkah laku pragmatis (Majchrzak, 1984 dalam Danim Sudarwan, 2000).

Dalam penelitian ini metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata dan sekarang (sementara berlangsung). Penggunaan metode ini bertujuan untuk menggambarkan/mendiskripsikan secara sistematis sifat suatu keadaan yang sedang berjalan pada saat dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu gejala tertentu (Travers, 1978 dalam Sevilla et al, 1993).

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengambilan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan pencatatan yang telah

dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait dengan topik penelitian. Sebagai data utama dalam penelitian ini adalah dokumen perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana, peraturan perundangan dan laporan penelitian yang relevan.

Pengambilan data primer dilakukan melalui diskusi kelompok dengan melibatkan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), pengambilan data primer juga dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan pejabat instansi dan pihak yang terkait dengan menggunakan pedoman wawancara. Disamping wawancara terstruktur juga akan dilakukan wawancara mendalam terhadap *key informan* dan observasi lapangan.

Dalam studi ini analisis data yang digunakan adalah deskriptis kualitatif dan interpretatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan pertama dan kedua, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan terjadinya bencana dan dampaknya terhadap pelayanan dasar dan tindakan atau inisiatif masyarakat untuk memenuhi pelayanan dasar sesuai dengan kebutuhannya. Analisis menggunakan data berupa teks yang berasal dari berbagai dokumen yang relevan, fokus grup diskusi dan observasi lapang. Reduksi data dilakukan sejak awal penelitian dan difokuskan pada tujuan penelitian. Untuk merumuskan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi data awal, saat penelitian berlangsung melalui diskusi untuk mempertajam dan menguatkan temuan-temuan dan mensistesisikan sebagai kesimpulan penelitian.

HASIL

Gambaran Umum Wilayah Merapi

Wilayah Kabupaten Sleman secara geografis terbentang mulai 110°13'00" sampai dengan 110°33'00" BT dan mulai 7°34'51" sampai dengan 7°47'03" LS. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 574,82 Km atau sekitar 18 persen dari luas wilayah Propinsi DIY yang seluas 3.185,80 Km.

Gunung Merapi terletak di wilayah kabupaten Sleman dan dijadikan Taman Nasional Gunung Merapi melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 134/MENHUTII/ 2004 tanggal 4 Mei 2004 seluas 6.410 Ha. Pada bulan Juni 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014, Taman Nasional Gunung Merapi ini ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang diprioritaskan penataan ruangnya dalam rangka rehabilitasi kawasan dengan sudut kepentingan lingkungan hidup, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Hal ini menjadi penting dalam proses pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah. sehingga perlu adanya kegiatan yang memberikan informasi terkait Perpres tersebut. Penataan ruang KSN Merapi diharapkan akan mampu mendukung fungsi kawasan sebagai tempat bagi

masyarakat untuk mencari hidup dan penghidupan (pengembangan ekonomi), daerah tangkapan air dan habitat bagi keanekaragaman hayati. Penataan dan pengelolaan ruang pada kawasan ini harus berbasis pada kawasan rawan bencana, kawasan yang berfungsi sebagai resapan air serta kawasan yang menjadi tempat hidup bagi keanekaragaman hayati.

PEMBAHASAN

Penduduk

Jumlah penduduk di wilayah KSN Merapi tahun 2013 mencapai 212.133 jiwa. Kecamatan Ngeplak memiliki jumlah penduduk tertinggi yakni mencapai 62.124 jiwa dan Kecamatan Cangkringan memiliki jumlah penduduk terendah yakni 29.054 jiwa seperti di sajikan pada Tabel 1.

Sosial Budaya

Beberapa aspek sosial budaya yang masih mengakar pada masyarakat di kawasan Merapi adalah kultur Jawa, diantaranya diadakan: (1) Labuhan Merapi yang dilangsungkan di pos II Gunung Merapi Kinahrejo Desa Umbulmartani Kecamatan Cangkringan; (2) Upacara dan tradisi yang merupakan rangkaian peringatan jumenengan Sri Sultan HB X ini dilaksanakan tiap tanggal 30 Rajab dan 1 Ruwah setiap tahun.

Ketenagakerjaan

Ditinjau dari aspek tenaga kerja, kelompok umur >35 tahun menempati jumlah terbesar yaitu 63.964 dari 106.426 orang (60.1 persen), sedangkan kelompok usia produktif terendah adalah pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu 8.460 orang (7.9 persen), kategori ini merupakan kelompok usia muda yang masih dalam usia sekolah seperti disajikan pada Tabel 2.

Adapun jumlah pengangguran di KSN Merapi sejumlah 7.319 orang. Jumlah pengangguran terbesar didominasi oleh mereka yang tamat SMA yaitu 3.310 orang (45.2 persen), kelompok pengangguran yang tamat SLTP 1.461 orang (19.96 persen) seperti disajikan pada Tabel 3. Besarnya jumlah pengangguran di KSN Merapi tersebut diantaranya adalah akibat erupsi Merapi. Dampak Merapi telah menyebabkan kemunduran sektor pertanian (perkebunan dan peternakan) yang merupakan pekerjaan utama masyarakat sebelum terjadinya erupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelayanan dasar di daerah belum memenuhi kebutuhan bagi desa di daerah rawan bencana. Pelayanan dasar di desa bencana merupakan salah satu bentuk mitigasi untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat desa di daerah rawan bencana. Bencana alam gunung

berapi mempunyai dampak kerusakan yang cukup besar terhadap wilayah di sekitarnya. Akibat dampak primer erupsi Merapi yang berupa awan panas “*wedus gembel*” telah merusak fasilitas pelayanan dasar, perekonomian dan pelayanan dasar.

Kerusakan fasilitas pelayanan dasar telah menimbulkan dampak sebagai berikut: Perubahan tata ruang wilayah kawasan dan pola ruang desa, mengakibatkan sebagian wilayah 3 dusun di Desa Glagaharjo (Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul dan Srunen) dan 4 dusun (Kaliadem, Jambu, Petung, Kopeng), berubah menjadi KRB III dan ATL dan harus pindah ke tempat yang lebih aman. Perubahan tata ruang Merapi belum sepenuhnya disepakati sebagian masyarakat, 3 dusun di Glagaharjo sehingga mereka tidak bersedia di relokasi ke Hunian Tetap yang disediakan pemerintah. Kerusakan prasarana dan prasarana pendidikan dan berhentinya proses belajar mengajar. Kerusakan fasilitas pelayanan dasar di bidang kesehatan. Kerusakan di bidang perumahan dan permukiman dan relokasi permukiman; dan Kurangnya pelayanan terhadap kelompok rentan (bayi, ibu hamil, lansia dan penyandang cacat).

Dampak erupsi Merapi telah menumbuhkan prakasa/ inisiatif masyarakat untuk melakukan pengurangan risiko bencana sebagai berikut: Membentuk kelompok-kelompok PRB dan sebagai kelembagaan lokal bertugas membuat standard operasional penyelamatan dan pelaksanaan evakuasi pada saat terjadi bencana. Membangun dan memperbaiki jalur-jalur evakuasi; dan Membangun kerjasama antar desa sebagai tempat pengungsian “desa bersaudara” (*sister village*) yang sekaligus sebagai tempat belajar anak-anak di pengungsian (*sister school*).

Saran

Desa atau kawasan rawan bencana gunung berapi mempunyai risiko yang diakibatkan yang ditimbulkan oleh aktivitas primer (awan panas, lahar panas) dan sekunder (longsor lahar dingin) dan menyebabkan kerusakan fasilitas pelayanan dasar. Oleh sebab itu, standard atau ukuran-ukuran pelayanan dasar (SPM) desa rawan bencana harus bersifat spesifik (sederhana, konkrit, mudah diukur, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan). Pelayanan dasar dan bersifat wajib dan menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota, selama ini masih belum menjangkau desa-desa di daerah rawan bencana. Mengingat cakupan dan SPM pelayanan dasar mempunyai jenis dan ukuran yang sangat luas, maka tidak seluruhnya harus dibebankan kepada pemerintah Kabupaten Kota. Sebagai norma desa, adalah melakukan kerjasama antar desa melalui skema “desa bersaudara-*sister village*”. Sebagai penyempurnaan adalah musyawarah untuk membangun kesepakatan dengan korban bencana penentuan lokasi perumahan baru, tata ruang permukiman.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Daerah Kecamatan Kemalang. (2015). 03 Oktober 2016.
<https://Klatenkab.Bps.Go.Id/>.

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015). *Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Resiko Bencana 2015-2030*. Terjemahan : Platfrom Nasional PRB. 4 Maret 2017. <http://bnpb.go.id/uploads/publication/1101/Deklarasi%20Sendai%20%20Bilingual.pdf>.
- Barita, Iskal & Zulaicha, Endang. (2012). *Gambaran Masalah Kesehatan Masyarakat Antara Sebelum Dan Setelah Letusan Gunung Merapi Di Wilayah Kerja Puskesmas Srumbung Magelang*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta. 22 Februari 2017. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3638/ISKAL%20BARITA%20%20ENDANG%20ZULAICHAH%20Fix.pdf?sequence=1>.
- Bakornas PB. (2007). *Pedoman Penanggulangan Banjir Tahun 2007-2008*. Jakarta.
- Bungin, M. Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. 03 Februari 2017. <http://bnpb.go.id/uploads/migrationpubs478.pdf>.
- Dharma, K. K. (2011). *Metodologi Penelitian Keperawatan Jilid 1*. Jakarta: TIM.
- Djafri, D. & Nofrianti, A, R. (2013). *Hubungan Tingkat Kesadaran dan Karakteristik Keluarga dengan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Gempa dan Stunami di Kota Padang Tahun 2013*. Laporan Hasil Penelitian, Universitas Andalas Padang. Padang : Universitas Andalas. 4 Maret 2017. <http://repo.unand.ac.id/327/1/Laporan%2520Final%2520Kesiapsiagaan%2520Bencana.pdf>.
- Dodon. (2013). *Indikator dan Perilaku Kesiapsiagaan Masyarakat di Permukiman Padat Penduduk dalam Antisipasi Berbagai Fase Bencana Banjir*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.24 No. 2.
- Hidayati, Desi Nurul. (2014). *Kesiapan Tanggap Bencana Masyarakat Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Terhadap Ancaman Erupsi Gunung Kelud*. Skripsi, Universitas Negeri Surabaya. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya. 23 September 2016. <http://ejournal.unesca.ac.id>.
- Indrizal, Edi. (2015). *Diskusi Kelompok Terarah Focus Group Discussion (FGD) (Prinsip-Prinsip Dan Langkah Pelaksanaan Lapangan)*. Skripsi, Universitas Andalas. Padang. Universitas Andalas. 10 Oktober 2016. <http://ejournalantropologi.fisip.unand.ac.id>.
- Lindawati. (2015). *Hubungan Antara Coping Stress Dengan Subjective Well-Being Pada Penduduk Desa Balerante, Kemalang, Klaten*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta. 04 Oktober 2016. <http://eprints.ums.ac.id/362691/NASKAH%20PUBLIKASI%20BUAT%20PERPUS.pdf>.
- Lindell, M.K. and Whitney, M. (2000). *Correlates of Household Seismic Hazard Adjusment Adoption*. Risk Analysis, 20(1).

- LIPI-UNESCO/ISDR. (2006). *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami*. Jakarta : LIPI
- Mahendra, Galih. (2014). *Kapasitas Kelembagaan dan Kearifan Lokal dalam Antisipasi Penanggulangan Bencana Merapi Tahun 2010 di Kabupaten Klaten (Studi Kasus di Desa Balerante Kecamatan Kemalang)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro. Semarang : Universitas Diponegoro. 04 Oktober 2016. <http://fisip.undip.ac.id>.
- Musiskah. (2014). *Pengalaman Ibu Primipara Dalam Memberikan ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Utara*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 25 Oktober 2016. <http://repository.uinjkt.ac.id/space/bitstream/123456789241441MUSISKAH-fkik.pdf>.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, Djauhari. (2011). *Geologi untuk Perencanaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nurjanah, Sugiharto, Dede Kuswanda, Siswanto, Adikoesoemo. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
- Nurrahmah Widiyany. (2015). *Studi Fenomenologi Pengalaman Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Banjir Di Rt 001 Rw 012 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 27 Januari 2017. <http://repository.uinjkt.ac.id/space/bitstream/123456789306151WIDIANY%20NURRAHMAH%20-%20FKIK.PDF>.
- Permanasari, H, A. & Sunarto. (2011). *Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Gunung Merapi : Studi Kasus di Desa Umbulharjo, Sleman*. Vol. 6.No. 1. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 28 Oktober 2016. <http://jurnalkesmas.ui.ac.id/index.php/kesmas/article/view/118>.
- Priambodo, Arie, (2009), *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Ramli, Soehatman. (2010). *Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ratnawati, Erma. (2015). *Kesiapsiagaan Keluarga Dengan Lanjut Usia Pada Kejadian Bencana Di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten*. Skripsi. Stikes Muhammadiyah Klaten.
- Rante, Anshar. Farid Nur Mantu. Ilhamjaya Patellongi. (2012). *Tingkat Kesiapsiagaan Rumah Tangga Menghadapi Bencana Alam Tanah Longsor Di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo tahun 2012*. Tesis, Universitas Hasanuddin. Makassar : Universitas Hasanuddin. 10 Februari 2017. <http://pasca.unhas.ac.id/jurnalfiles70ecf776ef26e8c6e9af4187f8998133.pdf>.